

PENUNDAAN PEMBERIAN STATUS *MOST-FAVORED NATION*
OLEH PAKISTAN KEPADA INDIA TAHUN 2011-2014

Wulandari Endah Susilowati

wulandariendahs@gmail.com

Ilmu Hubungan Internasional – 20120510112

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstract

The relation between two neighborhood countries, Pakistan and India, has not been really good since before the independence of the two countries. They were one country at first and became a rival due to the differences of belief. The relationship of both countries was not really smooth, there were some conflicts and it caused wars between the two countries. In 2008, the relation has become worse due to the terrorism act in Mumbai, India. The suspect of the act was Lashkar-e-Thaiba that is based in Pakistan and the perpetrators were Pakistani citizens. In 2011, Pakistan said they would grant Most-Favored Nation (MFN) status to India in 2012 that has not been granted since they joined World Trade Organization (WTO) in 1995 to cool down the tension between the two countries, but later Pakistan chose to postpone the granting until now.

Keyword: *Pakistan, India, Most-Favored Nation, pengambilan keputusan*

Pendahuluan

Pakistan adalah sebuah negara Republik Islam yang berada di kawasan Asia Selatan. Pakistan mempunyai populasi penduduk terbesar ke-6 dengan

jumlah sekitar 191 juta, jumlah ini menjadikannya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar ke-3 (tiga). Sejarah Pakistan tidak dapat dilepaskan dari sejarah India. Pakistan yang dulunya merupakan bagian dari negara India, merdeka dari penjajahan Inggris pada 14 Agustus 1947 setelah pemisahan Pakistan dari India. Pakistan menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) sejak 1 Januari 1995. Sebagai anggota WTO, sudah sepatutnya bagi negara anggota untuk memberikan status anti diskriminasi perdagangan bagi sesama negara anggota atau sering disebut dengan *Most-Favored Nation* (MFN). Berdasarkan perjanjian WTO, negara anggota tidak diperbolehkan untuk mendiskriminasi sesama anggota sebagai mitra dagangnya, negara harus memperlakukan sesama anggota dengan sama tanpa diskriminasi. Begitu pula yang harus dilakukan oleh Pakistan. Sudah 20 tahun sejak Pakistan bergabung dengan WTO, namun hingga sekarang Pakistan masih belum memberikan status Most Favored Nation kepada India.

Suatu negara pasti akan memustuskan kebijakan luar negerinya berdasarkan kepentingan nasional negara tersebut. Negara merupakan aktor dalam mencapai kepentingan nasional dan hal tersebut didasarkan pada 3 (tiga) konsiderasi, yaitu: politik dalam negeri; kondisi ekonomi dan militer dalam negeri; dan konteks internasional.(Coplin, 2003) Tahun 2008, saat terjadi aksi terorisme di Mumbai yang membunuh 166 warga India membuat hubungan Pakistan-India memburuk. Akibat dari aksi tersebut, 166 warga India terbunuh. Hingga akhirnya kedua negara memutuskan untuk membuka kembali hubungan damai di tahun 2011. Pada tanggal 2 November 2011, kabinet Pakistan secara bulat memutuskan akan memberikan status MFN kepada India pada September 2012. Hal itu tentu disambut gembira oleh pemerintah India yang sudah menanti selama 15 tahun untuk diberikannya status MFN oleh Pakistan. Akan tetapi, janji tersebut tidak dipenuhi oleh Pakistan dan terus menunda pemberian status tersebut.

Pembahasan

Pada September 2012, Pakistan mengatakan bahwa pemberian status MFN akan ditunda hingga tahun baru 2013. India menunggu hingga tahun baru 2013, namun lagi-lagi Pakistan menunda pemberian yang sudah dijanjikan tersebut dan sekali lagi Pakistan berjanji akan memberikannya pada tahun 2014. (The Diplomat, 2014) Lalu pada 23 Maret 2014, Perdana Menteri Pakistan, Nawaf Sharif, mengatakan bahwa pemberian status MFN kepada India ditunda lagi. pada bulan Mei di tahun yang sama, Perdana Menteri Pakistan dan India bertemu dan membicarakan mengenai status MFN dan Perdana Menteri Nawaf Sharif mengatakan bahwa akan diberikan pada bulan Juli 2014. (Times of India, 2014) Hingga akhirnya pada 23 Juli 2014, Pakistan masih belum memberikan status MFN kepada India.

Faktor Politik dalam Negeri

Menurut William D. Coplin, sistem pengaruh kebijakan di negara manapun merupakan hubungan timbal balik antara pengambil keputusan dengan yang mempengaruhi kebijakan (*policy influencers*). Baik di negara demokrasi maupun autokrasi, para pemimpin memerlukan dukungan masyarakat karena hal tersebut dapat berarti sebagai dukungan pada rezim mereka. Dukungan tersebut dapat berupa kesetiaan angkatan bersenjata, dukungan finansial para pelaku usaha, dukungan rakyat dalam pemilihan umum, dan rakyat yang menolak melawan pemerintahan. Dukungan-dukungan tersebut penting bagi pengambil keputusan karena dapat membuat kedudukannya lebih pasti dan memberikan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya.

Policy influencers, di pihak lain, juga membutuhkan pengambil keputusan. Hal ini disebabkan oleh kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan oleh *policy influencers*. Apabila tuntutan-tuntutan yang diinginkan oleh *policy influencers* tidak terpenuhi, kemungkinan besar dukungan akan hilang. Jika tuntutan-tuntutan tersebut tidak terpenuhi, padahal jumlahnya semakin meningkat, maka dukungan dari *policy influencers* akan sulit didapat. Pengambil keputusan dapat menolak

tuntutan-tuntutan yang masuk serta meyakinkan *policy influencers* bahwa tuntutan tersebut tidak harus dipenuhi. Namun, pengambil keputusan mempunyai batas-batas tertentu untuk bisa mengabaikan tuntutan. Maka dari itu, walaupun tuntutan dan dukungan tidak selalu berimbang, para pengambil keputusan diharapkan dapat memenuhi tuntutan-tuntutan kecil yang diusulkan oleh para *policy influencers*. Coplin menyebutkan ada 4 (empat) *policy influencers*: birokrat; partai politik; kelompok kepentingan; dan massa. Setiap *policy influencer* mempunyai tingkat pengaruh yang berbeda tergantung pada sistem yang dianut oleh negara: terbuka atau tertutup.

Tabel 1

Arti Penting Influencers Kebijakan Luar Negeri (dalam bidang ekonomi) Menurut Tipe Sistem Politik dan Bidang Isu

Bidang Isu	Sistem Terbuka	Sistem Tertutup
Kebijakan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepentingan 2. Partisan 3. Birokratis 4. Massa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Birokratis 2. Partisan 3. Kepentingan 4. Massa

(Sumber: William D. Coplin, Introduction to International Politics)

Dalam kasus ini, Pakistan menyebut status Most-Favored Nation yang akan diberikan kepada India sebagai *Non-Discriminatory Market Access* (NDMA). Pakistan enggan menyebut menyebut status tersebut sebagai MFN karena menurut Pakistan, MFN berarti memberikan perlakuan akses pasar yang sangat spesial kepada India yang mana itu tidak benar. Namun, secara esensi status NDMA adalah sama dengan status MFN, yang mana merupakan kewajiban para negara anggota *World Trade Organization* (WTO) untuk memberikannya kepada sesama anggota negara, termasuk Pakistan ke India. Pakistan membuat keputusan untuk memberikan status MFN kepada India untuk memperkuat

hubungan persahabatan dengan India yang sempat goyah serta untuk memotivasi ekonomi dalam negeri Pakistan untuk maju dan dapat bersaing dengan India.

Pakistan yang bertekad untuk memberikan status MFN kepada India yang hal tersebut diumumkan pada tahun 2011 dan akan diberikan pada tahun 2012 tidak terlaksana hingga akhir tahun. Pakistan mendapat tuntutan-tuntutan dari *policy influencers* dalam negeri. Sesaat setelah diumumkannya kebijakan Pakistan yang akan memberikan status Most-Favored Nation kepada India, pemerintah mendapatkan protes dari kaum jihadi Pakistan, yaitu *United Jihad Council* dan *Difa-e-Pakistan Council*. Mereka beranggapan bahwa status MFN belum waktunya diberikan kepada India. Mereka meminta pemerintah Pakistan untuk menyelesaikan terlebih dahulu masalah Kashmir yang sudah bertahun-tahun tidak terselesaikan.

Tuntutan juga datang dari para pelaku industri, investor, petani, dan pedagang dalam negeri Pakistan. Mereka mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah terlalu terburu-buru. *Pakistan Pharmaceutical Manufacturers Associations* (Asosiasi Produsen Farmasi Pakistan/PPMA) adalah kelompok kepentingan yang paling khawatir dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Menurut mereka, langkah tersebut secara signifikan akan mempengaruhi industri dalam negeri, dan mungkin terpaksa akan gulung tikar. India mempunyai kebijakan yang solid untuk melindungi industri dalam negeri mereka dan industri farmasi India sepuluh kali lebih besar daripada Pakistan, sehingga dapat membuatnya sebagai *global player*. Sedangkan industri farmasi dalam negeri Pakistan, belum mempunyai celah untuk itu. Kelompok petani Pakistan juga mengkritik kebijakan tersebut. Mereka merasa akan mengalami kerugian jika status MFN benar-benar diberikan karena India mempunyai subsidi untuk sektor agrikultur, sedangkan Pakistan tidak.

Pakistan merupakan negara republik yang melakukan pemilihan umum, menghargai pendapat dan tuntutan *policy influencers*, yaitu kelompok kepentingan. Mereka meminta pemerintah untuk menunda pemberian status MFN kepada India dengan alasan historis, yaitu Kashmir, dan ketidaksiapan para pelaku industri untuk bersaing dengan India. Sesuai dengan tabel 4.1, jika negara akan

membuat kebijakan luar negeri mengenai ekonomi, *policy influencer* yang paling berpengaruh adalah kelompok kepentingan. Mempertimbangkan tuntutan-tuntutan tersebut, pemerintah Pakistan memutuskan untuk menunda pemberian status MFN kepada India.

Faktor Ekonomi dalam Negeri

Coplin mengatakan bahwa lingkungan dalam negeri tidaklah cukup bagi para pemimpin untuk memutuskan suatu kebijakan luar negeri. Pengambil keputusan juga harus mempertimbangkan kekuatan ekonomi (dan militer) yang dimiliki, serta melihat kelemahan negaranya dalam membuat suatu kebijakan luar negeri. Pengambil keputusan harus dapat menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya berdasarkan keterbatasan-keterbatasannya yang dilihat dari kekuatan ekonomi (dan militer) negara. Kemampuan ekonomi memainkan peran yang penting dalam politik luar negeri. Menurut Coplin, ada 2 (dua) dimensi ekonomi yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara: (1) kapasitas produksi barang dan jasa; (2) ketergantungan negara terhadap perdagangan dan finansial internasional.

Kapasitas ekonomi suatu negara mencangkup tentang kemakmuran negara, sejauh mana ekonominya dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya, serta bagaimana pola-pola pertumbuhan ekonominya. Para ekonom telah menerapkan konsep *gross national product* (GNP) sebagai tolak ukur kemakmuran suatu negara karena GNP digunakan untuk mengukur nilai suatu barang dan jasa yang diproduksi oleh negara dalam setahun. GNP juga digunakan sebagai alat pembanding kekayaan antar negara karena nilai GNP dapat dikonversi kedalam satu standar mata uang. Akan tetapi, GNP tidak dapat menjadi pegangan untuk mengetahui kemampuan negara dalam memenuhi keinginan ekonomi rakyatnya. Indikator ekonomi yang lebih pas untuk mengukur hal tersebut adalah GNP per kapita (kekayaan dibagi jumlah negara). Indikator tersebut lebih baik dalam mengetahui apakah jumlah barang dan jasa yang diproduksi dapat memenuhi permintaan rakyatnya atau tidak.

GNP yang dimiliki Pakistan menurut World Bank termasuk level pendapatan menengah kebawah. Tahun 2010, GNP Pakistan adalah 184 miliar dolar Amerika dan di tahun 2011 naik menjadi 200 miliar dolar Amerika, tahun 2012 mencapai 224 miliar dolar Amerika. Walaupun tiap tahun GNP Pakistan mengalami kenaikan yang signifikan, tetapi negara tetangganya, yaitu India mempunyai GNP yang lebih tinggi. Tahun 2010, GNP India adalah 1,555 triliun dolar Amerika dan di tahun 2011 naik menjadi 1,755 triliun dolar Amerika, di tahun 2012 mencapai 1,892 triliun dolar Amerika. Angka tersebut membuktikan bahwa India lebih unggul dalam tingkat GNP. Menurut Bank Dunia, India berada di posisi 9 dengan GNP tertinggi, sedangkan Pakistan tidak masuk dalam 50 besar. GNP per kapita kedua negara juga menunjukkan bahwa India lebih unggul dari GNP per kapita Pakistan walaupun keduanya termasuk dalam level menengah kebawah dalam GNP per kapita.

Semua negara dewasa ini dipengaruhi oleh perdagangan dan finansial internasional. Hubungan antar negara dan unsur-unsur ekonomi internasional dapat dipandang dari neraca pembayaran (*balance of payments*). Neraca pembayaran menurut Coplin adalah seluruh transaksi luar negeri, termasuk didalamnya adalah pembelian dan penjualan luar negeri, investasi luar negeri, pengeluaran militer, serta pengeluaran dan penerimaan yang lainnya. (Coplin, 2003) Neraca perdagangan (*balance of trade*) adalah salah satu komponen neraca pembayaran, yaitu didalamnya termasuk ekspor dan impor barang yang *visible* saja, sedangkan neraca pembayaran termasuk barang dan jasa yang *visible* dan *invisible*. Jadi, jika neraca perdagangan suatu negara baik (ekspor barang lebih tinggi dari impor barang), maka belum tentu neraca pembayarannya juga baik. Tergantung seberapa besar penerimaan dan pengeluaran luar negeri negara tersebut, seperti bantuan luar negeri, investasi asing, pengeluaran militer, dan lain-lain.

Sejak kemerdekaannya tahun 1946, Pakistan telah mengalami defisit pada neraca pembayarannya setiap tahun, kecuali tahun 1950-1951, 1954-1955, 1955-1956, 1958-1959, dan 1959-1960. Defisit neraca pembayaran tertinggi dalam sejarah Pakistan adalah saat perang dengan India tahun 1965-1966. Tahun 2009-

2010, Pakistan mengalami defisit neraca pembayaran sebesar 10,945 miliar dolar Amerika, sedangkan tahun 2010-2011 juga mengalami defisit sebesar 8,3 miliar dolar Amerika. Menurut survei ekonomi Pakistan, tahun 2010-2011 impor Pakistan 32,3 miliar dolar Amerika dan ekspor hanya 24 miliar dolar Amerika.

Tabel 2:

Daftar Jumlah Defisit Neraca Pembayaran Pakistan dari Tahun 2007 Hingga 2011

Tahun	Defisit (dalam dolar Amerika)
2007-2008	16,8 miliar
2008-2009	12,72 miliar
2009-2010	10,945 miliar
2010-2011	8,3 miliar

(Sumber: Kementerian Keuangan Pakistan - <http://www.finance.gov.pk/>)

Volume perdagangan antara Pakistan dan India tahun 2009-2010 mencapai 1.45 miliar dolar Amerika. Ekspor Pakistan ke India hanya 275 juta dolar Amerika (19 persen dari total perdagangan bilateral). Sedangkan ekspor India ke Pakistan lebih dari 1,20 miliar dolar Amerika, dimana angka tersebut sebanyak 81 persen dari total perdagangan bilateral yang dilakukan kedua negara. Para ahli percaya bahwa Pakistan menyerap sekir 3 hingga 4 miliar dolar Amerika impor dari India melalui saluran yang tidak resmi, seperti penyelundupan dan routing melalui Dubai, Thailand, Singapura, dan lain-lain. Meskipun status MFN diberikan oleh India kepada Pakistan tahun 1996, namun hal tersebut kurang membantu Pakistan karena pemberian tersebut diikuti pemberlakuan sejumlah hambatan non-tarif oleh pihak India yang melumpuhkan akses produk Pakistan untuk masuk kedalam pasar India.

Pakistan sendiri sebenarnya adalah negara agrikultur yang tidak jauh beda dengan India dengan ekspor terbesarnya berupa beras, kapas, kulit, ikan, dan lain-lain. Namun, dari segi teknologi, India jauh lebih maju daripada Pakistan. Sejak tahun 1970-an, hanya sedikit modernisasi dan penggantian mesin di sektor industri swasta dalam negeri Pakistan. Penurunan produksi dan kualitas produk yang disebabkan kurangnya modernisasi pada mesin di sektor industri. Berbeda dengan India yang sekarang pendapatannya tidak lagi didapat dari sektor agrikultur saja. Seiring berjalannya waktu, ekonomi India semakin maju dan pendapatannya didapat melalui sektor teknologi informasi, teknologi otomotif, perminyakan, pertambangan, film, tekstil, dan sektor lainnya.

Untuk sektor film, sudah tidak diragukan lagi bahwa India mempunyai Bollywood yang sudah terkenal hingga ke seluruh dunia. Di tahun 2012, Bollywood menghasilkan 1.602 film dengan tiket terjual 2,6 miliar. (Forbes, 2011) Dari sektor otomotif, India mempunyai merk-merk seperti Bajaj dan Tata Motor yang telah diekspor ke berbagai negara. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah India sedang giat-giatnya untuk mengembangkan teknologi di dalam negeri. Jurusan teknik menjadi jurusan favorit bagi anak muda di India. Menurut survei, setiap tahun diperkirakan ada sekitar 100.000 mahasiswa yang lulus menjadi sarjana teknik dari 650 perguruan tinggi di India. (Times of India, 2015) Dari hal-hal itulah yang membuat sektor agrikultur sekarang hanya menyumbang sekitar 23% persen dari pendapatan negara India. Sektor agrikultur India pun jauh lebih unggul dari Pakistan. Di Pakistan, subsidi yang tidak merata dan ketidakseimbangan sumber daya air membuat para petani Pakistan lebih merugi. India juga lebih unggul dalam faktor mendukung para petani, mulai dari harga pupuk; ketersediaan mesin modern; sumber daya energi untuk pompa air; dan dana anggaran untuk sektor pertanian.

Sebagian besar masyarakat Pakistan adalah *consumption oriented*. Diakibatkan pertumbuhan populasi yang sangat cepat dan peningkatan konsumsi, barang-barang manufaktur dalam negeri yang dapat diekspor terpaksa harus digunakan didalam negeri untuk kebutuhan sehari-hari yang membuat Pakistan terus mengalami defisit. Sampai tahun 2011, daftar “positive list” berisi

barang-barang yang boleh diimpor dari India berisi 1.946 item. Padahal Pakistan sendiri hanya mengekspor barang ke India sebanyak 614 item(ICRER, 2013). Menteri Perdagangan Pakistan, Ameen Faheem mengatakan bahwa jika status MFN benar-benar diberikan kepada India, maka kurang lebih sekitar 6.800 item dapat masuk ke Pakistan. Dari kondisi ekonomi dalam negeri Pakistan tersebutlah yang membuat pemerintah memutuskan untuk menunda pemberian status MFN kepada India. Pakistan berpendapat bahwa penundaan tersebut akan berdampak baik bagi kondisi ekonomi dalam negeri Pakistan, khususnya sektor industri yang selama ini mengekspor barang-barang yang dihitung masih *raw* dibandingkan dengan India yang telah melebarkan sayapnya ke sektor teknologi. Setidaknya Pakistan dapat membangun industri dalam negerinya terlebih dahulu agar dapat bersaing dengan India dan meningkatkan GNP negara.

Kesimpulan

Jika mengamati hubungan bilateral antara Pakistan – India, memang tidak ada matinya. Keduanya dulu adalah sebuah keluarga yang sama-sama dijajah oleh Inggris. Namun, karena perbedaan prinsip kedua negara memilih untuk berpisah daripada tinggal di satu rumah tetapi selalu bertengkar. Setelah merdeka dan berpisah, hubungan kedua negara yang diharapkan rukun tidak terjadi. Berawal dari wilayah Jammu dan Kashmir yang mayoritas penduduknya adalah Muslim memilih untuk bergabung dengan India. Pakistan tidak menerima hal itu dan menuduh bahwa pemimpin Jammu dan Kashmir yang beragama Hindu membuat keputusan sepihak. Dikarenakan isu tersebut, Pakistan – India telah berperang sebanyak 3 (tiga) kali. Isu Kashmir sampai sekarang memang sangat sensitif bagi kedua negara dan banyak menyebabkan masalah yang memperkeruh hubungan kedua negara.

Hubungan kedua negara semakin keruh saat terjadi aksi terorisme di Mumbai tahun 2008. India menuduh pelaku dari aksi teror tersebut adalah orang-orang Pakistan yang merupakan anggota dari kelompok Lashkar-e-Thaiba yang berbasis di Pakistan. Pada awalnya Pakistan menyanggah tuduhan tersebut karena

belum ada bukti, namun Pakistan kemudian membenarkan bahwa pelaku adalah warga negara Pakistan. India lalu meminta Pakistan untuk menangkap dan memberi tindakan yang tegas terhadap kelompok Lashkar-e-Thaiba tersebut. Pakistan pun berjanji akan bertindak untuk menghentikan kelompok tersebut. Pakistan berhasil menangkap pemimpin Lashkar-e-Thaiba dan memasukkannya ke penjara. Tetapi, selang beberapa hari Pakistan melepaskannya dan hal tersebut memicu kemarahan India dan mengatakan bahwa Pakistan tidak serius dalam hal tersebut.

Ketegangan tersebut berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, hingga akhirnya Pakistan memutuskan untuk membangun kembali kepercayaan antar negara dengan memberikan status Most Favored Nation (MFN) kepada India. Keputusan tersebut disampaikan oleh Pakistan pada tahun 2011 dan rencananya status MFN akan diberikan selambat-lambatnya tahun 2012. India merasa senang hal tersebut karena status tersebut sudah ditunggu selama bertahun-tahun. India sendiri telah memberikan status MFN kepada Pakistan sejak tahun 1996, setahun setelah keduanya bergabung menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO). Di tahun 2012, Pakistan menunda pemberian status MFN tersebut kepada India dan berjanji akan diberikan tahun 2013. Di tahun 2013, Pakistan menunda kembali pemberian status tersebut dan berjanji akan diberikan di tahun 2014. Di tahun 2014, Pakistan menunda kembali pemberian status MFN tersebut dua kali dan setelah itu tidak ada kabar yang menunjukkan bahwa Pakistan sedang bekerja untuk memberikan status MFN kepada India.

India menganggap bahwa Pakistan hanya memberikan janji palsu saja sebab sudah bertahun-tahun janji tersebut dibuat namun tidak kunjung dipenuhi. Dibalik keputusan tersebut, terdapat alasan-alasan yang kuat bagi Pakistan untuk menunda pemberian status MFN kepada India. Protes-protes yang dilakukan oleh kelompok dalam negeri Pakistan, seperti kaum jihadi dan pelaku industri membuat Pakistan berpikir ulang tentang memberikan status MFN kepada India. Bagi kaum jihadi dan media, Pakistan diminta untuk menyelesaikan isu Kashmir yang masih belum selesai sebelum memberikan status MFN kepada India. Sedangkan bagi pelaku industri, status MFN akan memberikan dampak negatif

bagi industri dalam negeri Pakistan karena industri dalam negeri India jauh lebih maju dan ditakutkan akan membuat industri-industri dalam negeri Pakistan gulung tikar karena kalah bersaing. Selain itu, kondisi ekonomi dalam negeri Pakistan juga belum stabil dan masih tertinggal jika dibandingkan dengan India. GNP India lebih tinggi daripada GNP Pakistan. Ekspor – impor yang dilakukan kedua negara juga menunjukkan bahwa India mengekspor lebih banyak barang dan Pakistan mengimpor lebih banyak barang. Hal itu terjadi karena belum siapnya industri dalam negeri Pakistan untuk menopang ekonomi Pakistan, khususnya untuk diekspor. Barang ekspor Pakistan kebanyakan masih barang mentah, sedangkan India sudah mengembangkan teknologi untuk diekspor.

Referensi

Ali, H. A. (1996). *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*. Bandung: Penerbit Mizan.

Burki, J. S. (1988). *Pakistan Under Bhutto: 1971 - 1977*. London: Macmillan Press.

Coplin, W. D. (2003). *Introduction to International Politics* (Vol. 2). (M. M. Marbun, Penerj.) Bandung: Sinar Baru.

Forbes. (2011, September 3). *Bollywood: India's Film Industry by the Numbers*. Dipetik March 10, 2016, dari Forbes:
<http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2014/09/03/bollywood-indias-film-industry-by-the-numbers-infographic/#1bfa84bb7bf0>

ICRER. (2013, March 4). *India - Pakistan Trade*. Dipetik December 3, 2015, dari ICRIER: indiapakistantrade.org

Jusuf, S. (1989). *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Rizvi, H.-A. (2000). *Military, State, and Society in Pakistan*. London: Macmillan Publishing Company.

Suwarno. (2012). *Dinamika Sejarah Asia Selatan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

The Diplomat. (2014, March 1). *Pakistan to Grant India Most Favored Nation Status*. Dipetik October 12, 2015, dari The Diplomat:

<http://thediplomat.com/2014/03/pakistan-to-grant-india-most-favored-nation-status/>

Times of India. (2015, January 1). *Over 80% of Engineering Graduates in India Unemployable: Study*. Dipetik February 26, 2016, dari Times of India: <http://timesofindia.indiatimes.com/tech/tech-news/Over-80-of-engineering-graduates-in-India-unemployable-Study/articleshow/50704157.cms>

Times of India. (2014, March 23). *Pak Yet to Grant Most Favored Nation to India*. Dipetik October 12, 2015, dari Times of India: <http://timesofindia.indiatimes.com/india/most-favored-nation-India-granted-MFN-status-to-Pakistan/articleshow/38926051.cms>